



Pemerintah  
**Kabupaten Ketapang**



**Rencana Strategis**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Ketapang**  
Tahun 2025 - 2029

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029, yang di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028 dan tahun 2029 ke depan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 17 September 2025  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



**Ir. Adi Mulia M.Hut**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 199203 1 012

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Gambaran umum perangkat daerah .....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
2.1.2 Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah.....	27
2.2.2 Isu Strategis.....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra.....	33
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	37
4.1.1 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, terdiri dari kegiatan.....	38
4.1.2 Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, terdiri dari kegiatan .....	38
4.1.3 Program Penanganan kerawanan pangan dan Program Pengawasan kerawanan pangan, terdiri dari kegiatan .....	38
4.1.4 Program Pengelolaan perikanan tangkap, terdiri dari kegiatan .....	39
4.1.5 Program Pengelolaan perikanan budidaya, terdiri dari kegiatan .....	39
4.1.6 Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdiri dari kegiatan .....	39
4.1.7 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari kegiatan ..	39
4.2 Indiktor Kinerja Utama (IKU).....	110

4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	111
4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>115</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2. 1 Pegawai DKPP Kabupaten Ketapang Berdasarkan Golongan/Pangkat ...</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2. 2 Data Pegawai DKPP Kab. Ketapang Berdasarkan Jenjang Pendidikan...</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2. 3 Peralatan Elektronik dan Studio.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2. 4 Ketersediaan Produksi Pangan .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2. 5 Data Pembangunan Lumbung Pangan.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2. 6 Data Jenis produksi perikanan (TON) .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2. 7 Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 2. 8 Data Produksi Budidaya Perikanan dari Tahun 2021-2024.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2. 9 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 2.10 Data Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Perikanan Budidaya .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3. 2 Penetapan Renstra Perangkat Daerah .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /SubKegiatan Rancangan Akhir Renstra PD .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan .....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD .....</b>	<b>107</b>
<b>Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD .....</b>	<b>110</b>
<b>Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Renstra PD .....</b>	<b>112</b>
<b>Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD .....</b>	<b>114</b>

## Daftar Gambar

<b>Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 2. 2 Data Pegawai DKPP Kab. Ketapang Berdasarkan Jenjang Pendidikan</b>	<b>14</b>
<b>Gambar 2. 3 Grafik Produksi Pangan.....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 2. 4 Grafik Data Jenis Produksi Perikanan.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan .....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 2. 6 Grafik Data Produksi Perikanan Budidaya .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 2.7 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan .....</b>	<b>25</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tantangan pembangunan adalah merespon kondisi sosial yang semakin dinamis. Kondisi dinamis dalam konteks global ditandai dengan revolusi industri 4.0, maupun kondisi aktual yang menjadi tantangan seluruh komponen penduduk dunia. Di samping itu, terdapat amanat kesepakatan internasional yang perlu direspon dengan kebijakan hingga level daerah, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sedangkan dalam konteks nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memberikan arahan besar untuk melakukan perubahan/perbaikan di berbagai bidang, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kondisi Kabupaten Ketapang tidak kalah dinamis, yakni di satu sisi terdapat capaian pembangunan yang memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diurai bersama yang dimulai dari sistem perencanaan yang baik.

Perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran strategis dalam rangkaian proses pembangunan, yaitu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Salah satu bagian dari perencanaan pembangunan adalah Rencana Strategis (Renstra) merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsif dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

4. Peraturan perundangan nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2025-2045
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 127);

26. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketaha Pangan Dan Perikanna Kabupaten Ketapang

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029 dan di sertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

#### 2. Tujuan

- a. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029, dan sekaligus mewujudkan visi, misi, sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam meningkatkan kinerja organisasi meningkatkan komunikasi dan interaksi antar pimpinan staf dan karyawan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri no 2 tahun 2025) adalah sebagai berikut :

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra

	K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD
1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD sebagaimana yang menjadi visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.
---------------------------------------	---

**B IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA NYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta indicator, target dan pagu indikatif.

Indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran umum pelayanan perangkat daerah**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai peraturan daerah nomor 48 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretaris, masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

1. Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas ketahanan pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian.
3. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan pangan yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.

4. Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan perikanan tangkap yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
5. Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan perikanan budidaya yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam masing-masing seksi.
6. Unit pelaksana teknis dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan meliputi unit Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Unit Pelaksana Perikanan (UPP). UPTD Dinas dipimpin oleh kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis secara operasional dikoordinasikan oleh bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
7. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, terdiri dari fungsional bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kelompok Fungsional dikordinir oleh tenaga fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator penyuluh. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

#### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
  - ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
  - ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
  - ✓ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan perikanan;

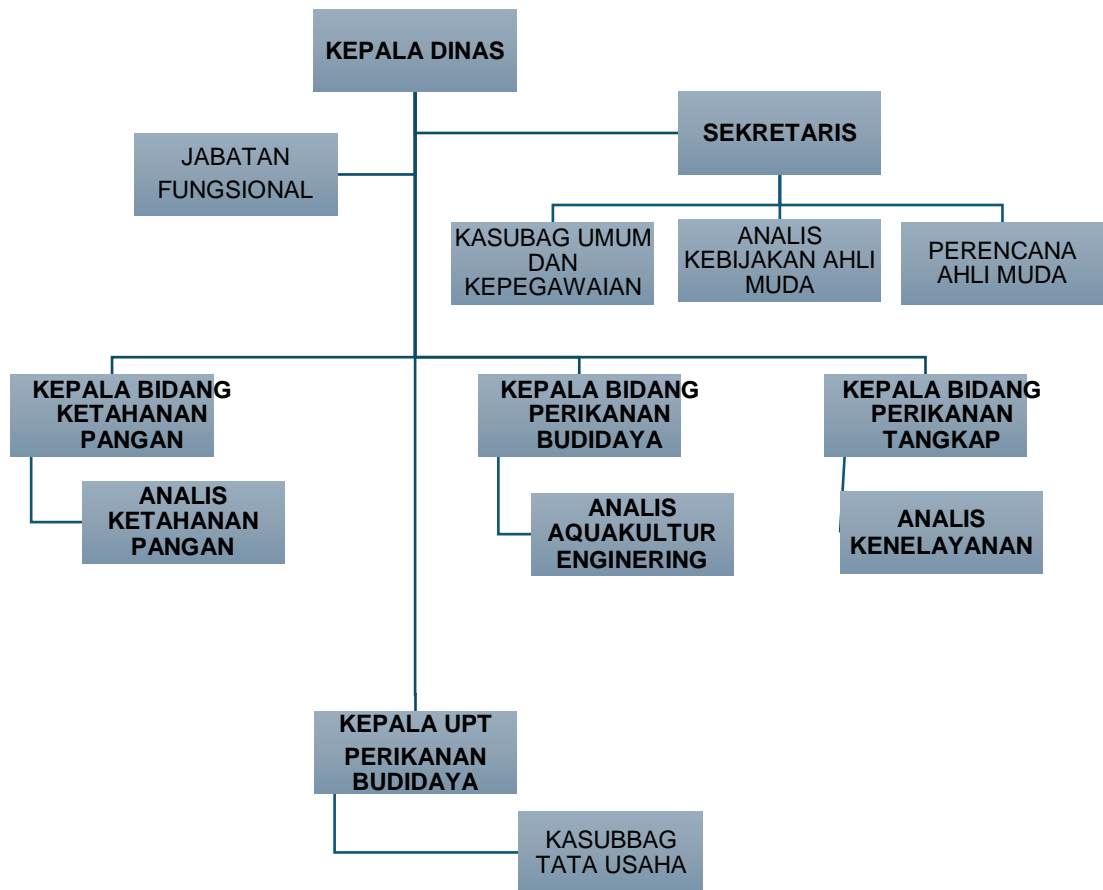
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- ✓ penyusunan perencanaan dinas;
  - ✓ penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas
  - ✓ penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
  - ✓ penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
  - ✓ pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
  - ✓ pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian ;
  - ✓ pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - ✓ Penyusunan program dan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
  - ✓ Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
  - ✓ Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
  - ✓ Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi ketersediaan dan distribusi pangan dan seksi konsumsi dan keamanan pangan;
  - ✓ Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
  - ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
  - ✓ Perumusan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap;
  - ✓ Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
  - ✓ Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
  - ✓ Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan nelayan dan seksi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan(TPI);
  - ✓ Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
  - ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;

- ✓ Penyusunan program dan kegiatan dibidang perikanan budidaya;
- ✓ Penyusunan pedoman pelaksanaan dibidang perikanan budidaya;
- ✓ Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan dan pengembangan usaha perikanan dan seksi pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- ✓ Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- ✓ Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

### **c. Uraian Tugas Dan Fungsi**

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang serta beberapa staf. Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Anaslis Kebijakan Ahli Muda
  3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
  1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- d. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
  1. Analis Kenelayanan Ahli Muda
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
  1. Analis Aquakultur Engineering Ahli Muda
- f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas :
  1. UPT. Perikanan Budidaya Kec. Muara Pawan



**Gambar 2. 1 Struktur Organisaai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan**

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai pegawai/personil ASN sebanyak 39 orang (per 31 Maret Tahun 2025), terdiri dari:

- Pegawai yang bertugas di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 35 orang,
- Pegawai yang bertugas di UPT dan BBI sebanyak 4 Orang,
- Selain pegawai / personil ASN tersebut diatas juga dibantu oleh pegawai tidak tetap sebanyak 53 orang.

Berdasarkan golongan / pangkat pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

- Pegawai Golongan IV sebanyak 8 (delapan) orang atau 34,15% dari jumlah keseluruhan pegawai

- Pegawai Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) atau 43,90% dari jumlah keseluruhan pegawai
- Pegawai Golongan II sebanyak 6 (enam) atau 21,95% dari jumlah keseluruhan pegawai.

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Pegawai DKPP Kabupaten Ketapang Berdasarkan Golongan/Pangkat**

No	Gol/Pangkat	a	B	c	d	Jumlah
1	IV	6	1	1	-	8
2	III	15	2	2	6	25
3	II	-	-	1	5	6
Jumlah						39

Berdasarkan tingkatan pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, lebih didominasi pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA (41,46%), pegawai dengan pendidikan setingkat D.III (2,44%), pegawai dengan pendidikan setingkat D.IV (4,88%), pegawai dengan pendidikan setingkat S1 (34,15%) dan pegawai dengan pendidikan setingkat S2 (17,07%). Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya sebagai berikut :

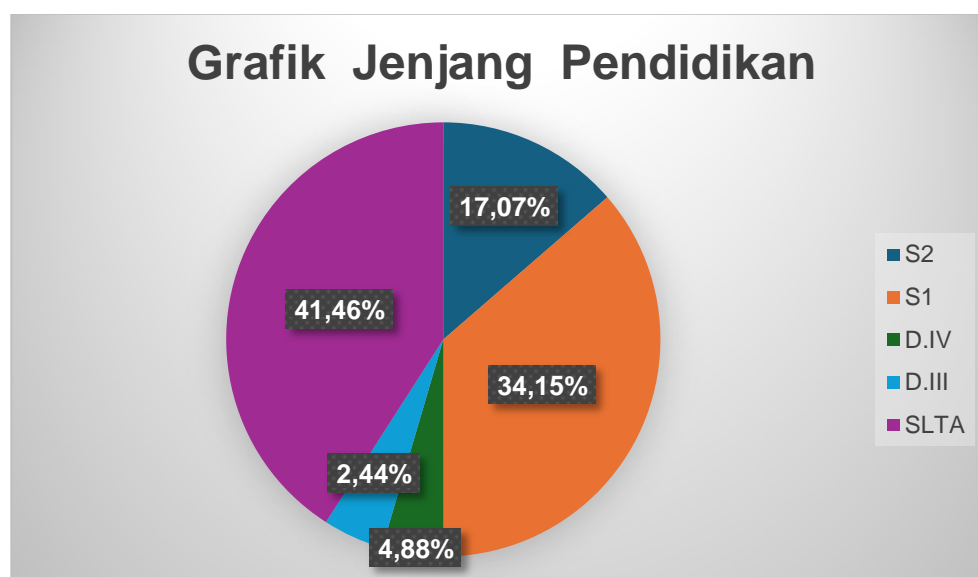
**Tabel 2. 2 Data Pegawai DKPP Kab. Ketapang Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2	
	- Magister Kehutanan – M.Hut	1
	- Magister Sains – M.Si	1
	- Magister Administrasi Publik M.A.P	1
	- Magister Sosial – M.Sos	2
	- Magister Pertanian – MP	1
2.	Strata 1	
	- Sarjana Perikanan – S.Pi	1
	- Sarjana Pertanian – S.P	9
	- Sarjana Teknologi Pertanian – S.TP	4

	- Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian – S.PKP	2
	- Sarjan Pendidikan – S.Pd	1
	- Sarjana Ekonomi – SE	3
	- Sarjana Teknik – ST	1
3.	Sarjana Muda (Diploma)	
	- Diploma IV. Perikanan	1
	- Diploma III. Perikanan	1
4.	SLTA	10
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>
.....		

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang yang berpendidikan SLTA cukup banyak, hal ini dikarenakan masih belum banyak pegawai yang menempuh/meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 2 Data Pegawai DKPP Kab. Ketapang Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Sumber Daya Manusia

1. Kurangnya tenaga dengan disiplin ilmu Gizi
2. Tidak adanya tenaga analisis bidang ketahanan pangan
3. Tidak adanya tenaga kearsipan yang menangani arsiparis Dinas
4. Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan Pangan
5. Kurangnya pelatihan peningkatan kualitas SDM yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Analisa kebutuhan pegawai

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan belum mencukupi kebutuhan, selain itu pada kenyataannya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki belum optimal dalam melaksanakan tugas.

✓ Permasalahan antara lain :

1. Beberapa tenaga teknis masih merangkap tugas lain,
2. Untuk melaksanakan tugas teknis pada Bidang Ketahanan Pangan dibutuhkan sarjana tenaga Ahli Gizi dan tenaga ahli analisis pangan
3. Pendistribusian pekerjaan belum memperhatikan pendidikan staf

✓ Solusi :

1. Melakukan penataan ulang terkait dengan job diskription pegawai yang disesuaikan dengan analisis jabatan (Anjab),
2. Diusulkan tambahan fomasi Pegawai Negeri Sipil dengan spesifikasi pendidikan sarjana ahli gizi, sarjana teknik sipil, sarjana perikanan, tenaga analisis ketahanan pangan dan arsiparis.
3. Dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh atasan langsung agar semua pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## **B. Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang dimiliki, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten ketapang terdiri dari gedung kantor,

kendaraan bermotor, peralatan elektronik, peralatan studio sarana informasi dan sebagainya.

### 1. Gedung Kantor

Dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten ketapang memiliki :

- a) 1 unit gedung kantor yang terletak di komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang di Jalan Jendral Sudirman No. 15 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- b) 7 unit UPP yang terletak di Kecamatan Simpang Dua, Kec. Sungai Laur, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kec. Air Upas, Kec. Manis Mata, Kec. Marau, Kec. Matan Hilir Utara dan 3 unit Pos Penyuluh Perikanan yang terletak di Kec. Tumbang Titi, Kec. Simpang Hulu dan Kec. Matan Hilir Selatan.
- c) 1 unit Gedung Kantor UPTD di Kecamatan Muara Pawan.
- d) 2 unit BBI yang terletak di Kecamatan Sandai dan Kecamatan Matan Hilir Utara (Dusun Manjau), 1 unit Panti Benih Mulia Baru dan 1 unit BPIP di Kec. Kendawangan.

### 2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten ketapang memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a) Kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit
- b) Kendaraan roda 2 sebanyak 33 unit

### 3. Peralatan Elektronik dan Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten ketapang meliputi computer 10 unit, laptop 18 unit, LCD dan projector 1 unit, telepon dan faxmille 1 unit, sarana WIFI, televisi, printer, AC dan lain-lain.

**Tabel 2. 3 Peralatan Elektronik dan Studio**

No	Jenis Barang	Banyaknya (unit)
1.	Computer	10
2.	Laptop	18
3.	LCD dan Proyektor	1
4.	Telepone dan faximile	1
5.	Sarana WIFI	4
6.	TV	1
7.	AC	20
8.	Printer	25

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### A. Kinerja Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan

Kinerja bidang ketahanan pangan di fokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Ketapang termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) berdasarkan Permentan no 65 / Permentan 01.140/12/10 tentang SPM bidang ketahanan pangan propinsi dan kabupaten / kota. Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang ketahanan pangan dibentuk menjadi 3 (Tiga), yaitu :

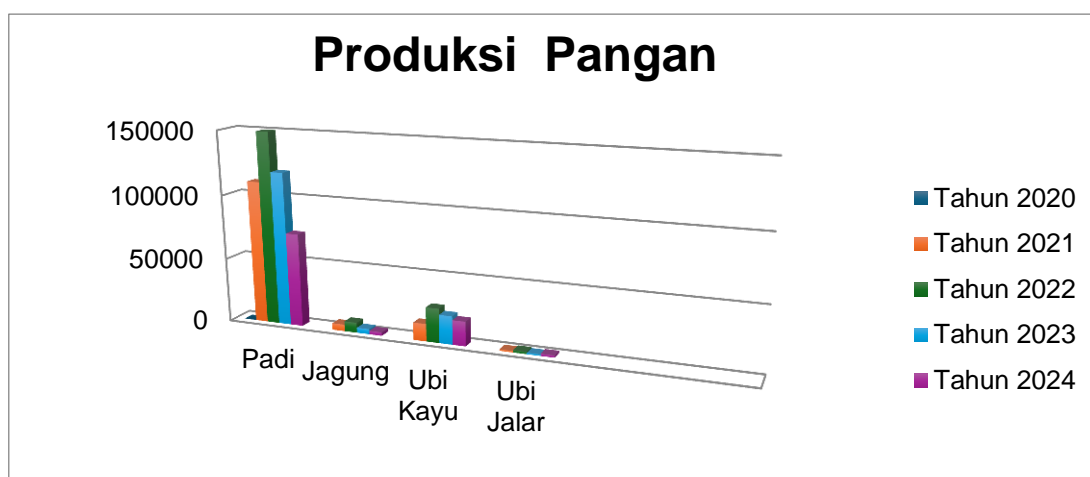
1. Indeks Ketersediaan Pangan
2. Indeks Keterjangkauan Pangan
3. Indeks Pemanfaatan pangan

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang mempunyai lahan potensi pertanian yang cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian dan peningkatan produksi pertanian yang diharapkan kedepannya dapat menjadi kabupaten penyedia pangan secara nasional. Ditinjau dari perkembangannya, ketersediaan pangan di Kabupaten Ketapang selalu mengalami peningkatan khususnya padi, jagung, kacang – kacangan, sayuran dan tanaman lainnya. Kebutuhan pangan di Kabupaten Ketapang hampir terpenuhi seluruhnya baik yang berasal dari potensi domestic maupun dari luar. Selain ketersediaan dan konsumsi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai kacang-kacangan dan umbi-umbian, Kabupaten Ketapang memiliki sumber pangan lainnya yaitu Ikan sungai, ikan laut dan ikan hasil budidaya air tawar, selain itu sumber pangan lain berasal dari ternak seperti telur dan daging.

**Tabel 2. 4 Ketersediaan Produksi Pangan**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton) / Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	110,953	149,661	107,660	119,370	72,705
2.	Jagung	5,205	7,895	3,523	4,017	2,734
3.	Ubi Kayu	13,627	26,542	27,651	21,912	19,025
4.	Ubi Jalar	1,142	1,853	1,027	1,119	1,700

Ketersediaan Produksi padi di Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Ketersediaan Produksi padi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 149,661 (ton) mengalami kenaikan sebesar 38,708 (ton) dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 72,705 (ton) dikarenakan kemarau berkepanjangan. Pada tahun 2024, produksi jagung mencapai 2.734 (ton). Hal ini menunjukkan terjadi fluktuasi dari tahun ketahun, pada produksi jagung dilihat dari tahun 2020 produksi jagung mencapai 5.205 ton, lalu naik menjadi 7.895 ton pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 turun menjadi 3.627 (ton), tahun 2023 meningkat menjadi 4.017 (ton). Tahun 2023 produksi jagung kurang maksimal dikarena pengaruh El Nino yang mengakibatkan musim kering bekerpanjangan sehingga penanaman jagung kurang optimal. Sementara itu untuk Ketersediaan Produksi ubi kayu turun dari 21.912 (ton) pada tahun 2023 menjadi 19.025 (ton) pada tahun 2024. Penurunan hasil ini terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga hasil panen kurang maksimal. Selanjutnya untuk Ketersediaan Produksi ubi jalar pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.700 (ton) mengalami peningkatan signifikan selama dua tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa Kecamatan di dua tahun terakhir tersebut.



**Gambar 2. 3 Grafik Produksi Pangan**

Dalam rangka pemanfaatan ketersediaan pangan diusahakan pula pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Pembangunan lumbung pangan ini telah dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan sebanyak 6 (enam) Unit dibangun dari tahun 2023 sampai dengan 2024, data pembangunan lumbung pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 5 Data Pembangunan Lumbung Pangan**

No	Kecamatan	Jumlah Lumbung (Unit)	Lantai Jemur (Unit)	Biaya Pembangunan Lumbung (Rp)	Biaya Pembangunan Lantai Jemur (Rp)	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan
1	Matan Hilir Selatan	1		165.000.000		APBD	2023
2	Matan Hilir Selatan		1		82.500.000	APBD	2023
3	Matan Hilir Utara		2		300.000.000	APBD	2024
4	Simpang Hulu		2		200.000.000	APBD	2024
	Jumlah	1	5	165.000.000	582.500.000	APBD	2023-2024

Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaan pada saat musim paceklik. Upaya yang dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan tujuan :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan pangan
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan
3. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui pemanfaatan perkarangan, dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan perkarangan sebagai cadangan di perkarangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan perkarangan dikelola melalui pendekatan terpadu dengan berbagai jenis tanaman, untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara berkala guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan pangan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu selain peningkatan produksi pangan, peningkatan penganekaragaman pangan menjadi sangat penting terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang pada umumnya masih bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat, sehingga konsumsi beras melebihi yang dianjurkan. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, salah satu upaya peningkatan

penganekaragaman pangan yaitu dengan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH). Semakin tinggi peningkatan skor PPH menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan semakin besar, maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi dinilai semakin baik.

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat dipisahkan yang penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin ketersediaan pangan yang aman, termasuk pangan segar dan makanan jadi untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh pencemaran biologis.

## **B. Kinerja Pelayanan Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**

Secara geografis Kabupaten Ketapang berada disisi Selatan Propinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi  $0^{\circ}19'26,51''$  Lintang Selatan sampai  $3^{\circ}4'16,59''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}47'36,55''$  Bujur Timur sampai  $111^{\circ}21'37,36''$  Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai  $31.588 \text{ KM}^2$  dan merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Kalimantan Barat. Sedangkan secara administratif Kabupaten Ketapang terdiri 20 kecamatan, 253 desa dan 9 kelurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang mempertimbangkan pendekatan berbasis wilayah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Ketapang yang mempunyai wilayah pesisir, daerah perdesaan dan kawasan perkebunan terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan yang strategis dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Potensi pengembangan wilayah menyebar di 20 Kecamatan dengan potensi, karakteristik dan daya dukung yang berbeda. Misalnya di kecamatan pesisir dengan potensi kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau dan kawasan hutan kota, kawasan budaya dan alam, kawasan pengolahan hasil Perikanan, kawasan produksi peternakan, selain itu juga merupakan kawasan sentra tanaman pangan, kawasan industri berbasis tanaman pangan dan kawasan produksi Perikanan, sedangkan di kecamatan perhuluan merupakan potensi kawasan pertambangan, perkebunan, sentra pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, budidaya Perikanan, pariwisata alam, sentra peternakan dan sebagainya.

Kegiatan utama sektor Perikanan adalah Perikanan tangkap, Perikanan budidaya dan usaha pengolahan hasil Perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi

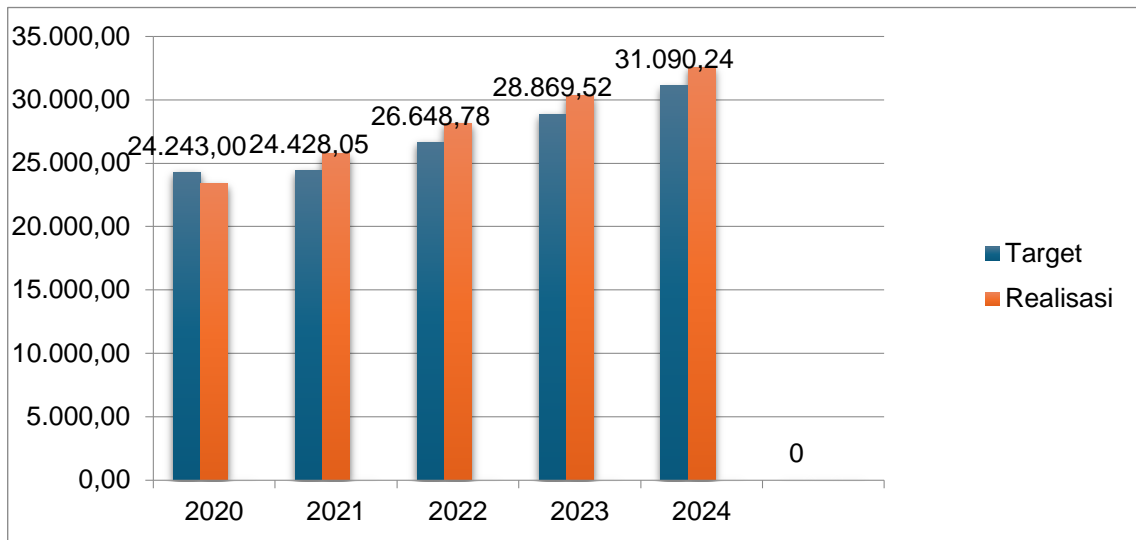
dalam penyediaan bahan pangan dari protein hewani. Dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Ketapang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

#### **a. Perikanan Tangkap**

Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren cenderung meningkat baik pada sektor perairan laut maupun perairan umum. Dapat Tahun 2020 Target produksi ditetapkan sebesar 24.243,00 ton, sementara realisasi mencapai 23.365,54 ton atau sekitar 96,38% dari target. Artinya, target belum tercapai meskipun capaian relatif mendekati sasaran. Tahun 2021 Target sebesar 24.428,05 ton, realisasi justru meningkat menjadi 25.730,00 ton. Tercapai 105,33% dari target, menunjukkan adanya peningkatan kinerja produksi yang positif. Tahun 2022 Target produksi ditetapkan 26.648,78 ton, realisasi sebesar 28.139,90 ton. Pencapaian ini mencapai 105,61% dari target, menandakan produktivitas budidaya maupun tangkap di perairan umum cukup baik. Tahun 2023 Target sebesar 28.870,52 ton, realisasi mencapai 30.324,76 ton atau 104,89%. Hal ini mengindikasikan konsistensi peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Tahun 2024 Target ditetapkan sebesar 31.090,24 ton, dan realisasi mencapai 32.544,48 ton mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun tersebut.

**Tabel 2. 6 Data Jenis produksi perikanan (TON)**

No	Tahun	Jenis Produksi (TON)		Target	Realisasi
		Perairan Laut	Perairan Umum		
1.	2020	22.201,10	1.164,44	24.243,00	23.365,54
2.	2021	24.490,43	1.239,57	24.428,05	25.730,00
3.	2022	27.205,11	934,79	26.648,78	28.139,90
4.	2023	28.947,26	1.377,50	28.870,52	30.324,76
5.	2024	31.109,50	1.434,98	31.090,24	32.544,48

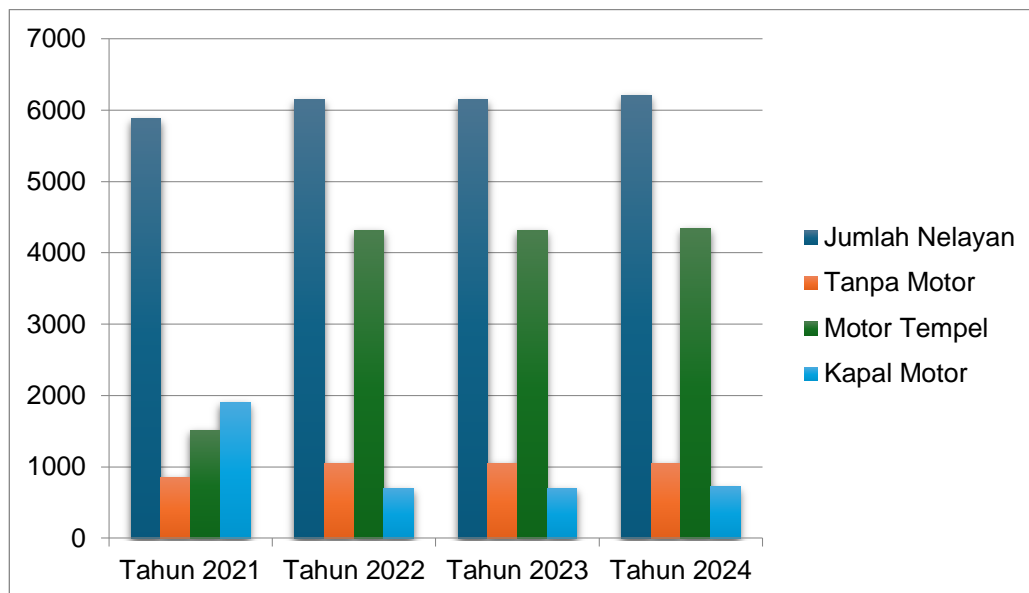


**Gambar 2. 4 Grafik Data Jenis Produksi Perikanan**

Secara umum Kabupaten Ketapang mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar dengan panjang pantai terpanjang di Propinsi Kalimantan Barat sepanjang 481,2 km. Selain perairan laut juga di aliri oleh beberapa sungai besar seperti sungai pawan, sungai pesakuan, sungai tengar dan lain sebagainya, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain sumber yang melimpah, Kabupaten ketapang memiliki sumberdaya manusia selaku pelaku utama pemanfaat potensi kelautan dan perikanan di dominasi oleh 49% nelayan tradisional dengan sarana penangkapan ikan yang masih sederhana. Data dan jumlah nelayan dan unit penangkap ikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 7 Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan**

No	Tahun	Jumlah Nelayan	Unit Penangkapan Ikan		
			Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor
1	2021	5.879	853	1.514	1.898
2	2022	6.149	1.049	4.314	702
3	2023	6.149	1.049	4.314	702
4	2024	6.210	1.051	4.344	720



**Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan**

Berdasarkan data jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan pada tahun 2021–2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 jumlah nelayan tercatat sebanyak 5.879 orang dengan unit penangkapan ikan terdiri dari 853 unit tanpa motor, 1.514 unit bermotor tempel, dan 1.898 unit kapal motor. Selanjutnya Tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah nelayan menjadi 6.149 orang. Namun, komposisi unit penangkapan mengalami perubahan cukup mencolok, yaitu peningkatan besar pada unit motor tempel (4.314 unit), sementara kapal motor menurun drastis menjadi 702 unit. Kondisi ini tetap sama pada tahun 2023, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan berarti dalam struktur unit penangkapan ikan. Memasuki tahun 2024, jumlah nelayan meningkat kembali menjadi 6.210 orang. Dari sisi unit penangkapan, terdapat sedikit peningkatan pada kategori tanpa motor (1.051 unit) dan motor tempel (4.344 unit), serta kapal motor (720 unit), meskipun kenaikannya relatif kecil dibandingkan lonjakan di tahun 2022. Sementara itu tahun 2021-2022 terjadi pergeseran besar dari kapal motor ke motor tempel. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi dimana motor tempel lebih murah dalam investasi dan operasional dibanding kapal motor. Serta akses pembiayaan dimana kemungkinan nelayan lebih mudah memperoleh bantuan/hibah untuk unit motor tempel. Dari hasil keseluruhan data di atas dapat di jelaskan bahwasanya jumlah nelayan terus meningkat, meskipun pertumbuhannya lambat serta terjadinya pergeseran signifikan jenis unit penangkapan dari kapal motor ke motor tempel pada tahun 2022, yang kemudian bertahan hingga 2024. Kemudian terjadinya peningkatan motor tempel mencerminkan kecenderungan nelayan memilih armada yang lebih ekonomis, meski bisa berdampak pada jangkauan wilayah tangkap dan hasil produksi.

### **b. Perikanan Budidaya**

Pemenuhan kebutuhan ikan di Kabupaten Ketapang dapat dipenuhi dari Minat masyarakat untuk melakukan budidaya kolam sangat tinggi walaupun produksi yang ada belum optimal yaitu pada tahun 2022 produksi budidaya perikanan 16.377,15 Ton, pada tahun 2023 meningkat menjadi 16.676,16 ton, pada tahun 2024 produksi meningkat menjadi 19.608 ton.

Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tabel 2. 8 Data Produksi Budidaya Perikanan dari Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Target	Realisasi (TON)
1	2020	20.370,00	21.316,90
2	2021	20.787,93	17.376,15
3	2022	22.866,73	16.377,15
4	2023	25.155,40	16.676,16
5	2024	27.668,74	19.608,00

Jika dilihat dari data diatas kinerja Produksi Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan pada tahun 2020 target berhasil tercapai dan bahkan terlampaui. Tahun-tahun berikutnya (2021–2024) realisasi di bawah target, dengan tingkat capaian menurun dari sekitar 83% hingga 66%. Sementara itu target produksi terus meningkat setiap tahun, menunjukkan optimisme pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi. Ada beberapa kemungkinan penyebab gap tersebut diantaranya; faktor eksternal meliputi perubahan iklim, cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem perairan; faktor internal yaitu keterbatasan sarana prasarana, biaya operasional tinggi, dan keterbatasan teknologi budidaya/penangkapan; permasalahan pasar dan distribusi dimana harga ikan yang fluktuatif dapat memengaruhi motivasi nelayan.

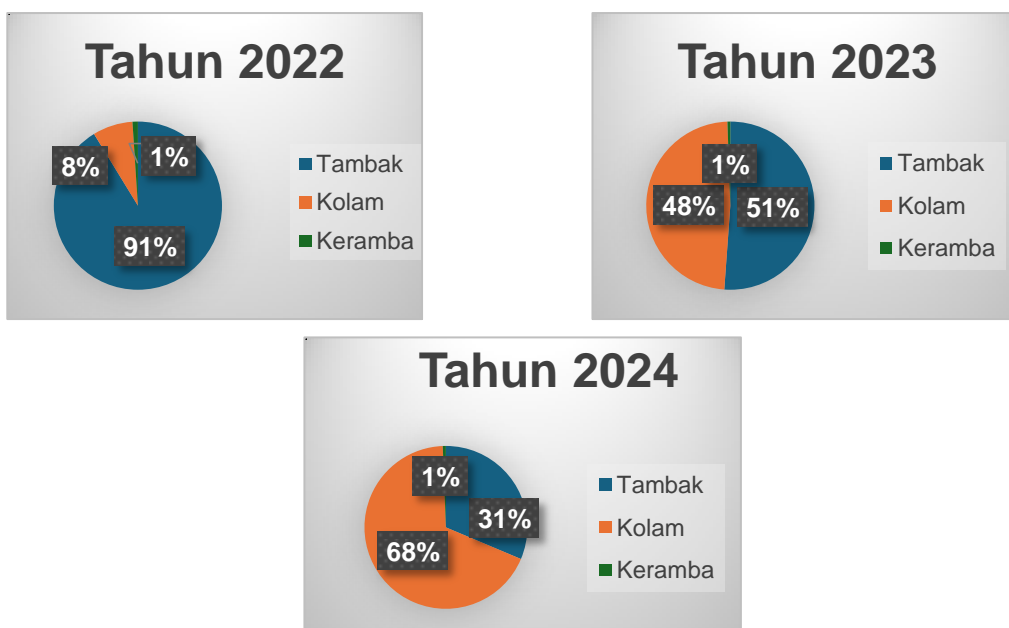


**Gambar 2. 6 Grafik Data Produksi Perikanan Budidaya**

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang dibagi berdasarkan jenis kegiatan budidaya yaitu jenis budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya keramba. Produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 9 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan**

Tahun	Produksi (TON)			
	Tambak	Kolam	keramba	Total
2022	8.822,68	7.454,49	99,98	16.377,15
2023	8.529,82	8.053,66	92,68	16.676,16
2024	6.148	13.339	121	19.608



**Gambar 2.7 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan**

Program peningkatan produksi perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan oleh karena itu telah dilaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat baik berupa pemberian bantuan maupun peningkatan sumberdaya manusia perikanan melalui pelatihan-pelatihan.

Pada tahun 2023-2024 telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dengan memberikan bantuan langsung kepada Masyarakat (kelompok pembudidaya ikan air tawar) baik dengan mekanisme pemberian hibah maupun pemberian menggunakan belanja modal. Data pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Data Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Perikanan Budidaya**

No	Jenis Bantuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Kelompok	Nilai Bantuan (Rp)	Jumlah Kelompok	Nilai Bantuan (Rp)
1.	Pembangunan KJA	2	176.980.000	-	-
2.	Peningkatan Kolam	1	167.810.000	1	100.000.000
3.	Pembangunan Rumah Tunggu	1	167.810.000	-	-

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Hampir seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang ditingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholder, baik stakeholder penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian dan perikanan serta stakeholder pendukung seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), pengusaha pengolahan hasil perikanan SKPD terkait, penangkar benih, pusat pelatihan, PKK, koperasi, Kelompok Tani dan lain sebagainya.

- ✓ Kelompok tani wanita
- ✓ Kelompok tani perikanan

Stakeholder tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan, beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya :

- ✓ Lembaga Distribusi pangan masyarakat (LDPM)
- ✓ Kelompok Lumbung Pangan
- ✓ Kelompok Afinitas pada desa mandiri pangan (Demapan)

- ✓ Tim penggerak PKK
- ✓ Taman posyandu
- ✓ Kelompok dasa wisma
- ✓ Kelompok usaha pangan olahan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah**

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Ketapang perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan perikanan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan perikanan untuk mensejahterakan masyarakat dimasa mendatang. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan dan perikanan adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat penangkap ikan terlarang serta tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
2. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, keterbatasan ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
3. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan, teknologi pengolahan, akses permodalan dan pemasaran produk.
4. Kualitas sumberdaya manusia nelayan masih rendah
5. Sarana dan prasarana alat tangkap masih sederhana
6. Over fishing diwilayah penangkapan dibawah 12 mil
7. Lemahnya lembaga usaha perikanan tangkap
8. Penggunaa alat tangkap tidak ramah lingkungan
9. Teknologi penangkapan ikan masih sangat tradisional
10. Terbatasnya akses modal dan pemasaran
11. Permasalahan dalam penyediaan pakan ikan
12. Skala usaha perikanan budidaya masih kecil

13. Kebiasaan atau adat istiadat penangkapan ikan masih menggunakan racun (TUBA) sehingga merusak dan mengancam keberlanjutan dari ekosistem ikan
14. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan.
15. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan ketahanan pangan dan perikanan lima tahun ke depan antara lain :

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ketapang akan meningkatkan permintaan terhadap produksi pangan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung munculnya usaha-usaha pangan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar.
3. Peningkatan permintaan akan produk pangan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
5. Ketersediaan sumberdaya lahan dan air sebagai faktor utama produksi belum dikelola secara optimal;
6. Keragaman sumberdaya alam dan keragaman hayati baik flora dan fauna belum di kelola secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya;
7. Kebijakan program dan prioritas, mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan Pangan serta Kelautan dan Perikanan dilakukan pemetaan dengan menggunakan pendekatan

pohon masalah yang mencakup masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah. Hasil pemetaan permasalahan Pangan ,Kelautan dan Perikanan jangka menengah di Kabupaten Ketapang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	Pangan	Ketahanan Pangan belum optimal	Ketersediaan pangan belum optimal
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai
	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pembudidaya/penangkap ikan belum optimal
			Akses terhadap bantuan permodalan belum optimal
			Sarana dan Prasarana belum memadai
			Metode budidaya dan penangkapan ikan masih konvensional
		Kerusakan ekosistem pesisir	Risiko perubahan iklim
			Ancaman penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem
			Pencemaran limbah dan sampah laut (sampah plastik)

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan dan perikanan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan dan perikanan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut yaitu “Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau serta Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan”

.Untuk dapat menyimpulkan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

**Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Optimalisasi Lahan, serta Diversifikasi Komoditas Lokal,	Ketahanan Pangan Belum Optimal	Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Persaingan Sumber Daya Alam	Tantangan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045	Masih rentanya ketahanan air, energi dan pangan	Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau
Pemanfaatan potensi tangkap laut, pengembangan budidaya, hilirisasi produk perikanan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya skala kecil	Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum optimal Kerusakan ekosistem pesisir	Persentase kemiskinan masih tinggi		Ekonomi laut belum optimal		Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan

# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2025-2029, melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan misi ke-4 “ **Memperkuat Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Daerah** “ Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan “Meningkatkan ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau serta Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan”

Sedangkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan “Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Meningkatnya Keterjangkauan Pangan, Meningkatnya Pemanfaatan Pangan, Serta Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB”.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>											
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Indeks Ketahanan Pangan (Nilai)	77.17	77.67	78.17	78.67	79.17	79.67	80.17	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	100.21	103.22	106.31	109.50	112.79	116.17	119.66	
			Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPI) (Indeks)	94.42	97.72	101.15	104.69	108.35	112.14	116.07	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan (Nilai)	84.56	85.11	85.66	86.21	86.75	87.30	87.85	
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Indeks Keterjangkauan Pangan (Nilai)	85.95	86.52	87.07	87.62	88.18	88.74	89.29	
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Indeks Pemanfaatan Pangan (Nilai)	65.04	65.46	65.88	66.30	66.72	67.14	67.56	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	26.10	26.49	26.98	27.29	27.7	28.12	28.54	

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi yang ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Organisasi Perangkat Daerah tersebut menciptakan nilai tambah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-Implementasi awal program prioritas	- Optimalisasi program prioritas	- Penguatan capaian sasaran	- Konsolidasi hasil	- Penutupan RENSTRA 2026–2030
- Penyesuaian target tahunan	- Intervensi terhadap isu strategis	- Sinkronisasi lintas sektor	- Penyusunan rekomendasi untuk renstra selanjutnya	- Evaluasi menyeluruh kinerja RENSTRA
- Penguatan kelembagaan dan SDM	- Monitoring dan evaluasi tengah periode	- Penyesuaian anggaran strategi	- Evaluasi capaian output dan outcome	- Sinkronisasi dengan RPJMD baru
- Konsolidasi data baseline				

Berdasarkan penjabaran strategis dan kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2025-2029 demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan memerlukan rumusan arah kebijakan terdiri dari rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No	Operasional NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memperkuat Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan Diversifikasi pangan Pengendalian inflasi, stabilisasi akses dan harga pangan adaptif melalui kebijakan dan regulasi yang relevan Pengembangan rantai nilai pangan (pengembangan industri pengolahan pangan, memperkuat sistem pemasaran dan distribusi pangan) Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian Optimalisasi pengelolaan gabah atau beras dalam negeri dan penyaluran cadangan beras pemerintah Pembangunan dan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Ketapang Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	

# **BAB IV**

## **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Maka langkah-langkah operasional akan dituangkan dan diimplementasikan kedalam program-program pembangunan ketahanan pangan dan perikanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan merupakan penjabaran lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang direncanakan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

### **4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Program-program pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi :

- a. Bidang Ketahanan Pangan, meliputi :
  - ✓ Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
  - ✓ Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
  - ✓ Program Penanganan kerawanan pangan.
  - ✓ Program Pengawasan keamanan pangan.

- b. Bidang Perikanan, meliputi :
    - ✓ Program Pengelolaan perikanan tangkap
    - ✓ Program Pengelolaan perikanan budidaya
    - ✓ Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
    - ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 4.1.1 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, terdiri dari kegiatan
- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
  - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - d. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - e. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
  - f. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
  - g. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 4.1.2 Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, terdiri dari kegiatan :
- a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.3 Program Penanganan kerawanan pangan dan Program Pengawasan kerawanan pangan, terdiri dari kegiatan :
- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
  - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - c. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah

Kabupaten/Kota.

- 4.1.4 Program Pengelolaan perikanan tangkap, terdiri dari kegiatan :
- a. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten /Kota.
  - b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota.
  - c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
  - e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- 4.1.5 Program Pengelolaan perikanan budidaya, terdiri dari kegiatan :
- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
  - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- 4.1.6 Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdiri dari kegiatan :
- a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
- 4.1.7 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari kegiatan :
- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
  - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
  - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
  - d. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

- e. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk lebih jelas tentang Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 Berikut:

**Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /SubKegiatan Rancangan Akhir Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>									
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan				Indeks Ketahanan Pangan				
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)				
					Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)				
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Ketersediaan Pangan		
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Nilai IKM Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban dan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

				Terpenuhinya Penyediaan Jasa yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak kendaraan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Jumlah Lumbung pangan dan lantai jemur yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	

					Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terwujudnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase daerah rentan rawan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

			Terwujudnya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
				Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
				Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		
				Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
				Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB			Indeks Keterjangkauan Pangan		
					Indeks Pemanfaatan Pangan		
					Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	

					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Terwujudnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Terwujudnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah produksi perikanan budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	

				Terwujudnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		persentase penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Persentase penurunan penggunaan keramba yang berlebihan dikawasan sungai	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	

					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan untuk Masyarakat		Angka konsumsi ikan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terwujudnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Terwujudnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

**Tabel 4. 2 Rencana Program /Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				11.074.086.933,31		11.973.720.764,21		12.165.908.264,21		12.362.900.451,71		12.664.817.443,90		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.637.322.822,86		9.948.060.875,00		10.140.248.375,00		10.337.240.562,50		10.539.157.554,69		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	89.50	92.50	9.637.322.822,86	93.5	9.948.060.875,00	95.5	10.140.248.375,00	97.5	10.337.240.562,50	100	10.539.157.554,69	2.09.3.25.0.0 0.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57.75	68.5		72.5		74.5		77.5		81.5			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				245.430.438,00		258.000.000,00		258.000.000,00		258.000.000,00		258.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	245.430.438,00	2	258.000.000,00	2	258.000.000,00	2	258.000.000,00	2	258.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-		314		314		314		314		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	

2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.430.438,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	70.430.438,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	85.000.000,00	4	83.000.000,00	4	83.000.000,00	4	83.000.000,00	4	83.000.000,00		
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	314	5.000.000,00	314	5.000.000,00	314	5.000.000,00	314	5.000.000,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.585.000.000,00		7.783.500.000,00		7.975.687.500,00		8.172.679.687,50		8.374.596.679,69		
Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban dan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.585.000.000,00	1	7.783.500.000,00	1	7.975.687.500,00	1	8.172.679.687,50	1	8.374.596.679,69		

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602	602		602		602		602		602			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.500.000.000,00		7.687.500.000,00		7.879.687.500,00		8.076.679.687,50		8.278.596.679,69		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602	602	7.500.000.000,00	602	7.687.500.000,00	602	7.879.687.500,00	602	8.076.679.687,50	602	8.278.596.679,69		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	15.000.000,00	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.886.709,56		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	25.886.709,56	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.891.764,01		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.891.764,01	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.891.764,01		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.891.764,01	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				22.103.181,54		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	22.103.181,54	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	-	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	-	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	-	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.943.803,53	300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1		214.943.803,53	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1				1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1				1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1				1		1		1			

2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.917.640,12		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	18.917.640,12	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.565.275,58		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	50.565.275,58	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.343.287,02		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	19.343.287,02	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				126.117.600,81		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	126.117.600,81	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				147.869.894,82		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terkelolanya Barang Milik Daerah Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	10	147.869.894,82	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.305.880,04		-		-		-		-	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	6.305.880,04	4	-	4	-	4	-	4	-	
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				117.587.876,51		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	117.587.876,51	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.976.138,27		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	23.976.138,27	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.235.369.582,24		1.240.560.875,00		1.240.560.875,00		1.240.560.875,00		1.240.560.875,00	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1.235.369.582,24	1	1.240.560.875,00	1	1.240.560.875,00	1	1.240.560.875,00	1	1.240.560.875,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.308.707,24		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.308.707,24	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.860.875,00		155.860.875,00		155.860.875,00		155.860.875,00		155.860.875,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	150.860.875,00	3	155.860.875,00	3	155.860.875,00	3	155.860.875,00	3	155.860.875,00	
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.081.200.000,00		1.081.200.000,00		1.081.200.000,00		1.081.200.000,00		1.081.200.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1.081.200.000,00	1	1.081.200.000,00	1	1.081.200.000,00	1	1.081.200.000,00	1	1.081.200.000,00	
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.822.394,71		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	
Terpenuhi nya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak kendaraan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	182.822.394,71	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32		32		32		32		32		

2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.887.510,40		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36	111.887.510,40	36	115.000.000,00	36	115.000.000,00	36	115.000.000,00	36	115.000.000,00		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.876.083,90		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	7.876.083,90	32	10.000.000,00	32	10.000.000,00	32	10.000.000,00	32	10.000.000,00		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				63.058.800,41		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	63.058.800,41	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				374.846.961,71		603.659.889,21		603.659.889,21		603.659.889,21		703.659.889,21		

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	10	30	374.846.961,71	35	603.659.889,21	40	603.659.889,21	45	603.659.889,21	50	703.659.889,21	2.09.3.25.0.0 0.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				374.846.961,71		603.659.889,21		603.659.889,21		603.659.889,21		703.659.889,21		
Jumlah Lumbung pangan dan lantai jemur yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	1	374.846.961,71	1	603.659.889,21	1	603.659.889,21	1	603.659.889,21	1	703.659.889,21		
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				374.846.961,71		603.659.889,21		603.659.889,21		603.659.889,21		703.659.889,21		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	1	374.846.961,71	1	603.659.889,21	1	603.659.889,21	1	603.659.889,21	1	703.659.889,21		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				732.034.946,11		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87.2	87.8	732.034.946,11	88.1	993.000.000,00	88.3	993.000.000,00	88.5	993.000.000,00	88.8	993.000.000,00	2.09.3.25.0.0 0.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				283.799.842,76		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		

Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	1	283.799.842,76	1	446.000.000,00	1	446.000.000,00	1	446.000.000,00	1	446.000.000,00		
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1		1		1		1		1			
	Informasi Stok Pangan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	1		1		1		1		1			

	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				43.058.800,41		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	1	43.058.800,41	1	64.000.000,00	1	64.000.000,00	1	64.000.000,00	1	64.000.000,00		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				27.835.280,24		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1	27.835.280,24	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				51.976.440,53		82.000.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	100	51.976.440,53	100	82.000.000,00	100	82.000.000,00	100	82.000.000,00	100	82.000.000,00		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				44.588.200,61		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		

Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	1	44.588.200,61	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				30.447.040,33		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	1	30.447.040,33	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				18.917.640,12		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	1	18.917.640,12	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				16.529.400,20		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1	1	16.529.400,20	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				12.611.760,08		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	1	12.611.760,08	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				6.305.880,04		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	1	6.305.880,04	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				18.917.640,12		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	18.917.640,12	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12.611.760,08		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	1	12.611.760,08	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				407.788.063,03		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		
Terwujudnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	75	75	407.788.063,03	75	495.000.000,00	75	495.000.000,00	75	495.000.000,00	75	495.000.000,00		
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	75	75		75		75		75		75			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75	75		75		75		75		75			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				324.658.682,48		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75	75	324.658.682,48	75	400.000.000,00	75	400.000.000,00	75	400.000.000,00	75	400.000.000,00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				31.529.400,20		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	75	75	31.529.400,20	75	35.000.000,00	75	35.000.000,00	75	35.000.000,00	75	35.000.000,00		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				51.599.980,35		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	75	75	51.599.980,35	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				40.447.040,32		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	40.447.040,32	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				18.917.640,12		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	18.917.640,12	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				21.529.400,20		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1	21.529.400,20	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				102.964.660,79		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	17.56	15.64	102.964.660,79	14.1 2	129.000.000,00	13.3 5	129.000.000,00	12.5 9	129.000.000,00	12.2 1	129.000.000,00	2.09.3.25.000.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				18.917.640,12		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terwujudnya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	18.917.640,12	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				18.917.640,12		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	18.917.640,12	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				84.047.020,67		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	1	84.047.020,67	1	109.000.000,00	1	109.000.000,00	1	109.000.000,00	1	109.000.000,00		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				12.611.760,08		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	1	12.611.760,08	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				58.823.500,51		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	1	58.823.500,51	1	79.000.000,00	1	79.000.000,00	1	79.000.000,00	1	79.000.000,00		
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				12.611.760,08		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	1	12.611.760,08	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				226.917.541,84		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	99.06	99.30	226.917.541,84	99,45	300.000.000,00	99,60	300.000.000,00	99,75	300.000.000,00	100	300.000.000,00	2.09.3.25.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				226.917.541,84		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	226.917.541,84	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1		1		1		1		1			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				12.611.760,08		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	12.611.760,08	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				18.917.640,12		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	1	18.917.640,12	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				154.941.101,32		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	154.941.101,32	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				15.223.520,16		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	15.223.520,16	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				25.223.520,16		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	25.223.520,16	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.381.633.830,9 0		3.282.000.000,0 0		2.889.812.500,0 0		2.992.820.312,5 0		2.990.903.320,3 1		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.291.835.288,8 9		1.642.000.000,0 0		1.449.812.500,0 0		1.502.820.312,5 0		1.500.903.320,3 1		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	28824.49	33433.048	2.291.835.288,8 9	3510 4.70	1.642.000.000,0 0	3685 9.94	1.449.812.500,0 0	3870 2.93	1.502.820.312,5 0	4063 8.08	1.500.903.320,3 1	2.09.3.25.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.752.209.406,5 6		1.130.000.000,0 0		937.812.500,00		990.820.312,50		988.903.320,31		
Terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	1.752.209.406,5 6	1	1.130.000.000,0 0	1	937.812.500,00	1	990.820.312,50	1	988.903.320,31		

	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8	8		9		9		10		10			
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	200	200		200		200		200		200			
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				51.426.351,69		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	51.426.351,69	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				1.690.000.000,00		900.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8	8	1.690.000.000,00	9	900.000.000,00	9	750.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				10.783.054,87		200.000.000,00		157.812.500,00		160.820.312,50		158.903.320,31		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	200	200	10.783.054,87	200	200.000.000,00	200	157.812.500,00	200	160.820.312,50	200	158.903.320,31		

3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				522.798.281,72		437.000.000,00		437.000.000,00		437.000.000,00		437.000.000,00		
Terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20	20	522.798.281,72	21	437.000.000,00	22	437.000.000,00	23	437.000.000,00	25	437.000.000,00		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	200		210		220		230		250			
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20	20		21		22		23		25			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				500.034.054,77		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	200	500.034.054,77	210	400.000.000,00	220	400.000.000,00	230	400.000.000,00	250	400.000.000,00		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				22.764.226,95		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		

Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20	20	22.764.226,95	21	22.000.000,00	22	22.000.000,00	23	22.000.000,00	25	22.000.000,00		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20	20	-	21	15.000.000,00	22	15.000.000,00	23	15.000.000,00	25	15.000.000,00		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				-		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terwujudnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	-	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		

	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1		1		1		1		1			
3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.827.600,61		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Terwujudnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	16.827.600,61	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	400	400		450		500		550		600			
3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				16.827.600,61		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	400	400	16.827.600,61	450	20.000.000,00	500	20.000.000,00	550	20.000.000,00	600	20.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				943.629.978,36		1.360.000.000,00		1.160.000.000,00		1.210.000.000,00		1.210.000.000,00		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	25153.40	29052.18	943.629.978,36	30504.79	1.360.000.000,00	32030.03	1.160.000.000,00	33631.53	1.210.000.000,00	35313.10	1.210.000.000,00	2.09.3.25.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				49.004.302,43		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2	3	49.004.302,43	4	70.000.000,00	5	70.000.000,00	6	70.000.000,00	7	70.000.000,00		
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2	4		5		6		7		8			

	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2	7		8		9		10		11			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	7		8		10		11		12			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				19.385.494,17		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	7	19.385.494,17	8	20.000.000,00	10	20.000.000,00	11	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				5.044.704,03		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2	3	5.044.704,03	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				9.458.820,06		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2	4	9.458.820,06	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00	8	10.000.000,00		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15.115.284,17		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	2	7	15.115.284,17	8	30.000.000,00	9	30.000.000,00	10	30.000.000,00	11	30.000.000,00		

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				894.625.675,93		1.290.000.000,00		1.090.000.000,00		1.140.000.000,00		1.140.000.000,00		
Terwujudnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100	100	894.625.675,93	100	1.290.000.000,00	110	1.090.000.000,00	110	1.140.000.000,00	115	1.140.000.000,00		
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	4		6		8		9		10			
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13	14		15		16		17		18			
	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				78.227.256,27		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	78.227.256,27	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				697.480.779,54		900.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13	14	697.480.779,54	15	900.000.000,00	16	750.000.000,00	17	800.000.000,00	18	800.000.000,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	4	100.000.000,00	6	300.000.000,00	8	250.000.000,00	9	250.000.000,00	10	250.000.000,00		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				9.458.820,06		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100	100	9.458.820,06	100	20.000.000,00	110	20.000.000,00	110	20.000.000,00	115	20.000.000,00		
3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				9.458.820,06		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1	1	9.458.820,06	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.922.500,61		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

Terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	persentase penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap	20	17	10.922.500,61	12	60.000.000,00	7	60.000.000,00	3	60.000.000,00	0	60.000.000,00	2.09.3.25.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Persentase penurunan penggunaan keramba yang berlebihan dikawasan sungai	30	22		19		16		13		10			
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				10.922.500,61		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0	11	10.922.500,61	12	60.000.000,00	13	60.000.000,00	14	60.000.000,00	15	60.000.000,00		

	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0	11		12		13		14		15			
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10.922.500,61		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0	11	10.922.500,61	12	30.000.000,00	13	30.000.000,00	14	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0	11	-	12	30.000.000,00	13	30.000.000,00	14	30.000.000,00	15	30.000.000,00		

3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				135.246.063,04		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Meningkatnya Konsumsi Ikan untuk Masyarakat	Angka konsumsi ikan	92.77	107.08	135.246.063,04	112.43	220.000.000,00	118.06	220.000.000,00	123.96	220.000.000,00	130.16	220.000.000,00	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				33.190.432,06		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terwujudnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	33.190.432,06	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				33.190.432,06		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	33.190.432,06	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				34.367.046,22		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terwujudnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	65	65	34.367.046,22	68	35.000.000,00	69	35.000.000,00	70	35.000.000,00	71	35.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				34.367.046,22		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	65	65	34.367.046,22	68	35.000.000,00	69	35.000.000,00	70	35.000.000,00	71	35.000.000,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				67.688.584,76		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3	5	67.688.584,76	7	150.000.000,00	9	150.000.000,00	11	150.000.000,00	13	150.000.000,00		

	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	550	560		570		580		590		600			
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.170.964,29		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	550	560	15.170.964,29	570	50.000.000,00	580	50.000.000,00	590	50.000.000,00	600	50.000.000,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				52.517.620,47		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3	5	52.517.620,47	7	100.000.000,00	9	100.000.000,00	11	100.000.000,00	13	100.000.000,00		

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	

			2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	

6.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Konsumsi Ikan untuk Masyarakat	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

## 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Ketapang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Misi 4 RPJMD : Meningkatkan ketersediaan, akses dan stabilitas pangan di Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Beberapa upaya pendukung yang dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan antara lain meliputi peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian sebagai upaya mendorong produksi pangan yang berkelanjutan, pengembangan komoditas unggulan, diversifikasi pangan dengan mendorong konsumsi pangan lokal, hingga pemberdayaan petani dan nelayan lokal. Selain berdampak pada ketahanan pangan Kabupaten Ketapang, misi ini juga diharapkan memiliki dampak terhadap kesejahteraan petani, nelayan dan peternak lokal.

Untuk penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
.	2.09.3.25.0.00. 03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan									
1.	Indeks Ketersediaan Pangan	Nilai	84,56	85,11	85,66	86,21	86,75	87,3	87,85	
2.	Indeks Keterjangkau an Pangan	Nilai	85,95	86,52	87,07	87,62	88,18	88,74	89,29	
3.	Indeks Pemanfaatan Pangan	Nilai	65,04	65,46	65,88	66,3	66,72	67,14	67,56	
4.	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	26,1	26,49	26,89	27,29	27,7	28,12	28,54	

1. Indeks Ketersediaan Pangan

merujuk pada ketersediaan suplai makanan yang cukup dari berbagai sumber, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor.

2. Indeks Keterjangkauan Pangan

Berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan. Aksesibilitas ini bisa bersifat fisik (misalnya, ketersediaan pasar) atau ekonomi (misalnya, kemampuan membeli pangan).

3. Indeks Pemanfaatan Pangan

Mencakup kemampuan individu atau rumah tangga dalam memanfaatkan pangan yang tersedia untuk mengonsumsi makanan yang cukup dan menyerap gizi dengan baik. Ini juga mencakup aspek seperti pengolahan makanan, kebersihan, serta penyerapan gizi yang tepat.

4. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Merupakan besar peranan atau sumbangan sektor perikanan (misalnya perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, jasa perikanan) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Berikut Indeks Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut adalah target kinerja daerah Kabupaten Ketapang periode 2025-2030 yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Renstra PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,17	77,67	78,17	78,67	79,17	79,67	80,17	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	13,48	12,98	11,88	10,38	9,48	8,98	7,78	
3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	100,21	103,22	106,31	109,5	112,79	116,17	119,66	
4	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	94,42	97,72	101,15	104,69	108,35	112,14	116,07	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	10	15	30	35	40	45	50	
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	17,56	16,41	15,64	14,12	13,35	12,59	12,21	
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	99,06	99,15	99,3	99,45	99,6	99,75	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,2	87,5	87,8	88,1	88,3	88,5	88,8	
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	77,96	100	100	100	100	100	100	
6	Produksi Perikanan Tangkap	%	105,04	100	100	100	100	100	100	

#### **4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diantaranya urusan pangan yang mencakup; Persentase Jumlah Cadangan Pangan, Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan, Skor Pola Pangan Harapan, dan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan. Sedangkan urusan Kelautan dan Perikanan mencakup; Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap.

**Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	komulatif	%	10	15	30	35	40	45	50	
2	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	komulatif	%	99.06	99.15	99.30	99.45	99.60	99.75	100	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	komulatif	Nilai	87.2	87.5	87.8	88.1	88.3	88.5	88.8	
4.	Persentase daerah rentan rawan pangan	komulatif	%	17.56	16.41	15.64	14.12	13.35	12.59	12.21	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	komulatif	%	77.96	100	100	100	100	100	100	
6.	Produksi Perikanan Tangkap	komulatif	%	105.04	100	100	100	100	100	100	

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.